

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERHENTIAN PEJABAT DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana*

OLEH :

FADIRA MUTIA MORETA
181011209

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Anton Rosari, S.H., M.H

Hendria Fithrina, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

No. Reg: 17/PK VII/IV/2025

	No. University Alumni	Fadira Mutia Moreta	No. Faculty Alumni
	a. Place/Date of Birth : Padang/March 18 th , 2000 b. Parents' Name : Fitri Junaidi, Erma Susilawati c. Faculty : Law d. CP : Administrative Law e. No. BP : 1810112091	f. Graduation Date : July 25 th , 2025 g. Pass Predicate : Very Satisfactory h. Study Durations : 6 Years 11 Months i. GPA : 3.94 j. Address : Permata Harbaindo Gg Berlian No. 19	

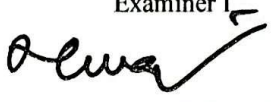
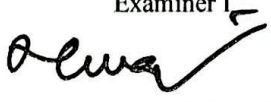
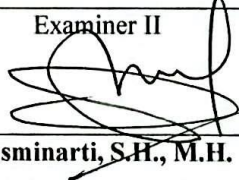
ADMINISTRATIVE LAW STUDY ON THE DECISION OF THE RECTOR OF ANDALAS UNIVERSITY REGARDING THE DISMISSAL OF OFFICIALS WITHIN ANDALAS UNIVERSITY
(Fadira Mutia Moreta, 1810112091, Faculty of Law Andalas University, Concentration Program Administrative Law, 89 Pages, 2025)

ABSTRACT

The Rector as the highest leader within the university has administrative authority. In Article 8 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration Law (GA Law), every use of authority by government officials must be based on laws and regulations and general principles of good governance and must be carried out accountably, proportionally, and without abuse of authority. The authority of the Rector to dismiss the Vice Rector is regulated under Government Regulation No. 95 of 2021 concerning PTN-BH Unand, as stated in Article 35 letter d, which mentions that The Rector has the duty and authority to appoint and dismiss officials under The Rector. This study focuses on three main issues: The legal position of The Rector of Unand as an administrative official in the Unand environment from the perspective of administrative law, Decision of the Rector of Unand regarding the Dismissal of Officials in the Unand environment in accordance with legislation and principles of good governance and how is the dispute resolution process carried out regarding the issuance of the Decision of the Rector of Unand regarding the dismissal of Officials in Unand according to Indonesian Law? This study employs a normative juridical research method with a descriptive approach through document analysis. The findings reveal that the Rector is qualified as an administrative official within Unand because according to the GA Law, Government Officials who carry out government functions and are given the authority to act in the legal realm, one of which is in terms of issuing decisions. The Rector's decision has been proven to violate the provisions of laws and regulations and violates the general principles of good governance, especially the principle of legal certainty. Dispute resolution has been carried out through administrative efforts: (1) objection efforts; (2) administrative appeal efforts. Because of no results were obtained from administrative efforts, further settlement effort were carried out, namely a lawsuit to the court.

Keywords: *State Administrative Decisions, State Administrative Officials, Authority.*

This thesis has been defended in front of the Examining Team and was declared passed on July, 23rd, 2025
Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Fadira Mutia Moreta	Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M	Gusminarti, S.H., M.H.

Know,
Chair of the Department of Administrative Law: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**


Signature

Alumni have registered with the Faculty/University and received an alumni number:

	Faculty/University Officer
No. Faculty Alumni	Name: Signature:
No. University Alumni	Name: Signature:

	Nomor Alumni Universitas	Fadira Mutia Moreta	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tanggal Lahir : Padang/18 Maret 2000 b. Nama Orang Tua : Fitri Junaidi, Erma Susilawati c. Fakultas : Hukum d. Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara e. No. BP : 1810112091		f. Tanggal Lulus : 25 Juli 2025 g. Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h. Lama Studi : 6 Tahun 11 Bulan i. IPK : 3.94 j. Alamat : Permata Harbaindo Gg Berlian No. 19

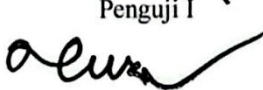
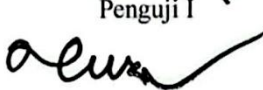
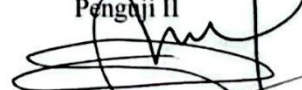
KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERHENTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS
(Fadira Mutia Moreta, 1810112091, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, 89 Halaman, 2025)

ABSTRAK

Rektor sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan universitas memiliki kewenangan administratif. Dalam Pasal 8 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yaitu setiap penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan wajib didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta harus dilakukan secara akuntabel, proporsional, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Kewenangan Rektor dalam memberhentikan Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Pemerintah No 95 Tahun 2021 tentang PTN-BH Unand diatur dalam Pasal 35 huruf d, yang menyebutkan bahwa Rektor mempunyai tugas dan wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana kedudukan hukum Rektor Unand sebagai pejabat administrasi di lingkungan Unand dalam perspektif HAN? 2. Apakah Keputusan Rektor Unand tentang Pemberhentian Pejabat di lingkungan Unand telah sesuai dengan perundang-undangan dan AUPB? 3. Bagaimana alur penyelesaian sengketa yang dijalankan terhadap terbitnya Keputusan Rektor Unand tentang pemberhentian Pejabat di lingkungan Unand menurut hukum di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan sumber data sekunder, dengan bahan hukum primer berupa undang-undang terkait yang didukung dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku serta jurnal-jurnal terkait. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Rektor dikualifikasikan sebagai pejabat administrasi di lingkungan Unand karena menurut UU AP, Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan diberi kewenangan untuk bertindak di ranah hukum, salah satunya dalam hal mengeluarkan keputusan. Keputusan Rektor tersebut telah terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum. Penyelesaian sengketa telah dilakukan melalui upaya administratif: (1) upaya keberatan; (2) upaya banding administratif. Karena tidak mendapatkan hasil dari upaya administratif, maka dilakukan upaya penyelesaian selanjutnya yaitu gugatan ke pengadilan.

Kata Kunci: *Keputusan Tata Usaha Negara, Pejabat Tata Usaha Negara, Wewenang*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 25 Juli 2025
Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Fadira Mutia Moreta	Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M	Gusminarti, S.H., M.H.

Mengetahui,
Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: